

DERAP PEREMPUAN SARMI MENUJU PAPUA BARU 'MEMBEDAH TANTANGAN, MENUAI HARAPAN'

Herman Kareth*

Abstrak

Kebijakan politik, pemerintah dan pembangunan menempatkan perempuan sebagai insan bahwa yang disejajarkan dalam pengembangan kualitas sumber Daya Manusia.

Hal tersebut berakar pada : 1). Intervensi kegiatan pemberdayaan yang tidak sesuai kebutuhan perempuan, 2). Ketidak tersediaan data yang memberi daya dukung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah membenteng masalah/tantangan (fakta hidup perempuan) dan harapan perempuan Sarmi ke depan.

Artikel menarik dari Siegfried Zoilner /Theodor Rath-Gerber (2006) “ Dalam Michael Raper (2008 : 1) terungkap bahwa dalam “Kehidupan Masyarakat Tradisional Perempuan Memberi Pengaruh Besar”. Untuk mencermatinya dikatakan bahwa Negara untuk kesejahteraannya, bukan rakyat ada demi prestise Negara.

Faktual tersebut dikaitkan dengan progres pendidikan wanita Sarmi, hasil penelitian Herman Kareth dkk (2011 : 37) menemukan perempuan Sarmi berjumlah 5.629 orang, terdapat perempuan Sarmi yang buta huruf atau tidak sempat mengenyang pendidikan di 10 Distrik berjumlah 1.742 orang (31 %).

Melandasi latar belakang pemikiran dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu populasi perempuan Sarmi di 5 Suku besar 5.69 orang dengan jumlah perempuan yang terbanyak berdomisili di wilayah Socio-Cultural : Sobey 2.268 perempuan, Manirem 1.101 perempuan, Armaty 459 perempuan, Isirawa 648 perempuan dan Rumbuay 1.020 perempuan.

Populasi perempuan Sarmi di 5 Suku besar 5.629 orang dengan jumlah perempuan yang terbanyak berdomisili di wilayah Socio – Cultural : Sobey 2.268 perempuan dan Rumbuay : 1.020 perempuan

Perempuan Sarmi yang tamat sekolah dasar : 1.370 (24%), SLTP : 692 (12%), dan SLTA : 489 (9%). Sedangkan jenjang SO, S1 dan S2 lebih sedikit : SO : 45, S1 : 16 sedangkan S2 : 3 perempuan.

Selain itu perempuan Sarmi yang putus sekolah rata-rata di 10 Distrik yaitu : Putus SD : 319, SLTP : 41, SLTP : 22 dan SO : 1 orang perempuan.

Data lain yang sangat menonjol adalah tingkat Buta Huruf mencapai 1.742 perempuan (31%), terdapat kecenderungan angka Buta Huruf tinggi di : Distrik Pantai Barat : 397 perempuan Distrik Tor atas : 289 perempuan.

Kata Kunci : *Derap Perempuan, Membedah Tantangan, Menuai Harapan*

TROT WOMAN OF SARMI GO TO NEW PAPUA OPERATE ON CHALLENGE
HARVEST EXPECTATION

Herman Kareth*

Abstrak

Policy of politics, governmental and development place woman as insane that parallel in development of human resource quality.

The mentioned take root at : 1). Intervention activity of inappropriate enableness of requirement of woman, 2). Available do not of data which is energy member support. As for target of which wish to be reached by is to unfold problem / challenge (fact live woman) and expectation woman of Sarmi forwards.

Article withdraw from Siegfried Zolner / Theodor Rath-Gerber (2006) " In Michael Raper (2008 1) expressed that in " Life Of Traditional Society of Woman Give Influence of Big". To him said that by State for its prosperity, non people there is for the shake of State prestige.

The Faktual related to progress education of woman of Sarmi, result of research of Herman Kareth dkk (2011 : 37) finding woman of Sarmi amount to 5.629 people, there are woman of illiterate Sarmi or no time is fully filled of education in 10 Canton amount to 1.742 people (31 %).

Base on idea background and research target, writer use descriptive research method aim to depict precisely the nature of an individual, situation, symptom, or certain group or to determine spreading or frequency a[n] population woman of Sarmi in 5 big tribe 5.69 people by amount of woman which living many in region of Socio-Cultural : Sobey 2.268 woman, Manirem 1.101 woman, Armaty 459 woman, Isirawa 648 and woman of Rumbuay 1.020 woman

Population woman of Sarmi [in] 5 big Tribe 5.629 people by amount of woman which living many in region of Socio - Cultural : Sobey 2.268 and woman of Rumbuay : 1.020 woman

Woman of Sarmi which is elementary school finish : 1.370 (24%), SLTP : 692 (12%), and SLTA : 489 (9%). While ladder of SO, S1 and of S2 slimmer : SO : 45, S1 : 16 while while S2 :3 woman.

Besides woman of broken Sarmi of mean school in 10 Canton that is : Breaking SD : 319, SLTP : 41, SLTP : 22 and SO : 1 women.

very uppermost Other data is Illiterate storey;level reach 1.742 woman (31%), there are tendency of high Illiterate number in : Coastal Canton of West : 397 woman of Canton of Tor to the : 289 woman

Keyword : Trot Woman, Operating On Challenge, Harvesting Expectation

I.Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kebijakan Politik, Pemerintahan dan Pembangunan menempatkan perempuan sebagai insan hawa yang disejajarkan dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Komitmen dan nurani bangsa mencuat dan melandas setelah

dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan memberi proteksi kepada perempuan dengan membentuk Kementerian Perempuan yang populer dengan nama Menteri Peranan Wanita di tingkat Pusat dan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terdapat Badan

* Herman Kareth adalah Dosen pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNCEN

Pemberdayaan Perempuan atau Kantor Pemberdayaan Perempuan.

Peluang emas bagi perempuan di era Surga Reformasi bersinar dan bagaikan Sinar Pelangi yang menghias bumi, disambut meriah insan hawa di seantero nusantara, namun secara khusus di Tanah Paradise alias Cenderawasih, Perempuan Papua beria-ria bagaikan cenderawasih betina menyambut cenderawasih jantan yang diibaratkan orang Paradise alias Burung Surga.

Ungkapan ini menandakan suatu gerakan politik baru untuk memberi proteksi bagi pengembangan dan pemberdayaan perempuan dengan sorot harapan sebagai warga negara, ibu harapan bangsa, penerus generasi manusia, diberi tempat dan posisi dalam proses pembangunan yang kini menggema di seluruh Nusantara.

Foto :1 Burung Cenderawasih



Sumber Foto : Mochtar 2010

Perempuan Papua yang mendiami belahan utara pulau Papua yang terbentang dari Pantai Timur (Kaptiauw) sampai pantai barat (Subu) dan wilayah utara dari pulau Liki sampai Tokomfo dalam 5 komunitas : Sobey–Armaty–Rumbuay–Manirem–Isirawa disingkat SARMI, tentunya

menyambut gembira gerakan proteksi dan pemberdayaan perempuan.

Perspektif socio-cultural dan kekerabatan membuka pintu peradaban baru telah mendorong masyarakat ke 5 komunitas dan pemerintah dimasa silam membentuk pusat pemerintahan dengan memberi nama “SARMI”.

Fenomena dan masalah sosial yang melanda perempuan di belahan Nusantara, juga mencekam perempuan Sarmi yang menghuni area pemerintahan dan area socio-cultural dari Kaptiauw di arah timur sampai Subu di sebelah barat dan wilayah utara dari pulau Liki sampai Tokomfo.

Masalah-masalah tersebut seperti : pemukiman kumuh, kesehatan (gizi) rendah, angka kematian (bayi) meningkat, angka buta huruf tinggi, penduduk miskin, pendapatan rendah atau tidak menentu, tabungan rendah, sebaran pasar lokal/pasar obor, masih merangkak pada ekonomi transisi/subsisten (peramu-peladang), perusakan lingkungan dan penyedotan hasil SDA (Property Right), tindak kekerasan terhadap perempuan, pemukulan, pembunuhan, perkosaan, perselingkuhan, beban kerja, tanggungan keluarga besar, pekerjaan yang berat, perceraian, poligami, ketularan HIV/AIDS, pemabukan, pelacuran (PSK) dan problema sosial lainnya yang selalu dialami dan mencekam perempuan Sarmi.

Permasalahan sosial yang timbul sebagai efek pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang tidak didasarkan pada ketersediaan data dan berbasis kebutuhan perempuan Sarmi.

Hal tersebut berakar pada : 1) Intervensi kegiatan pemberdayaan yang tidak sesuai kebutuhan perempuan,

2).Ketidak tersediaan data yang memberi daya dukung dalam penetapan kebijaksanaan dan kegiatan (proyek) yang menyentuh sasaran perempuan,3). Pengetahuan aparat pemerintah/kantor pemberdayaan perempuan tentang pentingnya pemetaan dan pendataan atau data yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan perempuan.

Tentang masalah data, juga diungkapkan oleh PBB- UNDP (2005 : 1).bahwa : “Permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan antara lain, adalah kurang tersedianya data tentang hasil-hasil pembangunan, data-data dasar kependudukan serta data-data tentang indikator-indikator pembangunan. Kondisi seperti ini sering menyebabkan kesulitan dalam menentukan target-target pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kecenderungan pengambilan keputusan secara bias karena tidak didasarkan pada data obyektif.

Mendasari pemikiran kritis tersebut, maka kebijakan siaga preventif pemerintah Kabupaten Sarmi yang dimotori Kantor Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih melakukan pemetaan perempuan asli Sarmi di wilayah administratif pemerintahan dan area socio-cultural di 10 Distrik, 2 kelurahan dan 82 Kampung serta aspek lainnya

2.Tujuan dan Sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :1).Membenteng masalah/tantangan (fakta hidup perempuan) dan harapan perempuan Sarmi ke depan, 2).

Merekam temuan dari berbagai sumber dan memberi masukan sebagai dokumen untuk menyusun buku mini “Derap Perempuan Sarmi Menuju Papua Baru ”Membedah Tantangan Menuai Harapan .

Sedangkan sasaran penulisan mencakup : 1). Sasaran populasi adalah Perempuan Asli Sarmi dan Perempuan Migran dengan cakupan aspek : jumlah dan sebaran menurut area administratif pemerintahan dan sebaran menurut area socio-cultural di 10 Distrik, 2 kelurahan dan 82 Kampung, 2).Sasaran capaian berupa produk penulisan: Derap Perempuan Sarmi Menuju Papua Baru ” Membedah Tantangan Menuai Harapan.

3. Pandangan Konseptual.

Pembangunan mutlak diperlukan peran serta perempuan sebagai mitra dalam pencerahan gender dan bukan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut disorot secara teoretis dan kebijakan Pemerintah.

Artikel menarik dari Siegfried Zolner/ Theodor Rath-Gerber (2006) “Dalam Michael Raper (2008:1) terungkap bahwa dalam”Kehidupan Masyarakat Tradisional, Perempuan Memberi Pengaruh Besar”.Untuk mencermatinya dikatakan bahwa Negara ada untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan rakyat ada demi prestise Negara.

Pemerintah Kabupaten Sarmi serta pemikiran teoretis para ahli tentang progres dan peradaban manusia dibelahan dunia manapun pernah berjalan melalui: tahap”primitif,transisi dan modern.”

Sedangkan dari perspektif kebijakan pembangunan maka pemerintah menetapkan proses progres dan

perubahan melalui tahap-tahap "masyarakat: berkembang-maju dan mandiri.

Proses ini memberi pencerahan bahwa walaupun sekelompok komunitas sudah berkembang dan maju tetapi kalau belum ada indikator kemandirian atau kompetitif mandiri, tetap masih memiliki sifat **dependency** atau ketergantungan kepada pihak lain, seperti pemerintah, LSM atau NGO dan lainnya.

Secara faktual, progres atau kemajuan dan peradaban penduduk Asli Sarmi jika dikaitkan dengan ketiga proses tersebut, masih berada pada tahap "**berkembang**" dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu sangat diperlukan kebijakan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan penerapan program-program strategis untuk memacu percepatan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hasil penelitian Koentjaraningrat (1964) dalam Laporan Pemerintah Kabupaten Sarmi (2006) tentang orang BGU / Bonggo (1994 : 230) disebut sebagai bagian dari komunitas 5 suku besar : SARMI termasuk Perempuan Sarmi mengungkapkan :Mata pencarian orang BGU (disebut juga orang Bonggo) yang utama adalah meramu sagu. Mereka mendiami daerah rawa-rawa di tepi pantai utara Irian Jaya dekat muara sungai Wiruwai, kurang lebih 120 kilometer sebelah barat Jayapura.

Dari perspektif pemerintahan, dimasa pemerintahan Belanda di tanah New Guinea, Pemegang tongkat kekuasaan (Pemerintah) Belanda menggunakan pendekatan sosio-cultural yaitu

pendekatan berbasis budaya dan kekerabatan.

Hal yang sama berlaku dimasa itu dimana seorang Antropolog Belanda Van Kouhen Houven, (RPJMD Kabupaten Sarmi, 2005 : 15) memberi nama SARMI yang merupakan singkatan dari socio-cultural lima komunitas : Sobey-Armati-Rumbuay-Manirem-Isirawa. Pendapat tersebut diperkuat dengan catatan yang dibuat Koenjaraningrat (1994) bahwa :

Disamping itu beberapa Antropolog dan Sosiolog Belanda yang meneliti komunitas di Sarmi : mengungkapkan "beberapa masyarakat daerah pedalaman itu telah dideskripsi dengan baik (Osterwal, 1959 ; 1961 ; 1963, Leeden, 1955 ; 1956), namun deskripsi mengenai penduduk daerah pantai hampir tidak ada selain beberapa laporan bekas pegawai jajahan (Berg 1940 ; Leeden, 1953 ; 1954 ; 1961; Dooren 1962) yang umum menyangkut keadaan ekonomi Daerah itu.

Seorang ahli lain : Doster Wal (1961), juga Van der Leeden (1956) telah masuk dan memetakan suku-suku bangsa di daerah pedalaman, yaitu orang BGU (Bonggo). Osterwal mengajukan suatu interpretasi lain (1961) berdasarkan bahan lapangan yang dikumpulkannya di daerah Tor Hulu. (Tor Atas)

Seiring dengan lajunya perubahan zaman dan pradigma baru di era reformasi dan era Papua Baru, telah terjadi pemekaran wilayah pemerintahan diseluruh tanah Papua. Dapat diprediksi kedepan Kabupaten Sarmi akan mengembangkan wilayah Pemerintahan alias pemekaran seperti Kabupaten Mamberamo Raya. Daerah

pemekaran baru bisa kearah pantai timur dan kearah pantai barat.

Namun akan timbul pertanyaan bagaimana nama Sarmi tetap lestari atau mengalami perubahan seperti halnya Kota Jayapura menjadi Port Numbay. Pertimbangan yang rasional dari perspektif historis dan sosio cultural/kekerabatan,walaupun kabupaten induk Sarmi memekarkan wilayahnya menjadi beberapa Kabupaten, nama Sarmi tetap dipertahankan / digunakan sebagai bukti sejarah pemerintahan dimasa silam, karena itu sebagai alat perekat yang menyatukan 5 komunitas.Sedangkan

- Paul N. Rosenstein-Rodan dalam M.L. Jhingan, (2008:177) mengatakan ” untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi atau modal yang besar.

Dengan menganalisis teori tersebut tentunya program strategis yang dilakukan Bupati Sarmi Drs. E.Fonataba, MM., sangatlah sejalan dan membuahkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat kabupaten Sarmi.

Foto : 2



Bupati Kab. Sarmi

Progres tersebut disambut positif. Bapak Pendekar Pembangunan : Drs. E. Fonataba, MM Alumni Universitas Cenderawasih, tahun 1975.

Dikatakan bahwa ” Terima Kasih atas pemetaan perempuan Sarmi oleh Universitas Cenderawasih dan Pemerintah serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Sarmi.

Diharapkan dari hasil pemetaan dapat mendukung pengambilan kebijakan sehingga : → yang lemah dikuatkan, → yang kuat diperkuat. Pada saat saya menerima Rombongan Wisata Rohani dari Kabupaten Biak Numfor saya berkata : Yang menikmati kemajuan di Papua baru masyarakat elit (PNS, POLRI, TNI, Pengusaha), sedangkan ”Orang Asli Papua” masih terbelakang. Bupati nyatakan fakta yang dapat dilihat, berapa ibu-ibu Papua yang berbelanja di Mall, Swalayan, kalau toh ada bisa dihitung dengan jari”.

Ungkapan ini mempunyai makna progres bagi perempuan Sarmi masih memerlukan intervensi / campur tangan pemerintah, dalam ”hati, kata dan gerakan pembangunan” dengan daya sentuh yang inovatif, kreatif dan dinamis agar masyarakat dapat bangkit, termotivasi dan menata hidup kedepan

secara mandiri di atas tanah kelahirannya sendiri.

Nampak kreatifitas perempuan Sarmi yang sedang merangkai bunga sebagai



proses kemandirian membedah tantangan menuai harapan menuju Papua Baru.

Itulah makna dan ketulusan hati sebagai seorang arsitek pembangunan dan pemegang Otoritas Welfare yang dipercaya rakyat saat pesta demokrasi berlalu, bukan sambutan dan pidato muluk, kata-kata indah dan canggih, kemasan kebijakan terselubung niat Primordialisme menurut garis kepentingan suku, agama, daerah dan unsur lainnya.

Pendapat menarik dari pakar dunia Prof. Goulet yang diangkat Michael P. Todaro (2006-90 : 91) mengatakan dalam kebijakan pembangunan terdapat 3 tata nilai pembangunan, yaitu : nafkah hidup, harga diri dan kebebasan :

- Nafkah hidup: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar: pangan, papan, kesehatan dan perlindungan. Semua orang mempunyai kebutuhan dasar tertentu yang apabila tanpa itu maka hidup ini menjadi tidak mungkin.
- Harga diri: kehidupan yang baik adalah harga diri dalam arti berharga dan terhormat dalam bentuk: ciri keaslian (hak-hak dasar), identitas, martabat, sikap hormat,

penghargaan/pengakuan, budaya, dsb.

- Kebebasan: bebas dari perbudakan, seharusnya merupakan arti penting dari pembangunan. Kebebasan bukan dalam arti politik (ideologi) tetapi bebas dari keterasingan, keterisolasian, kesengsaraan, dsb.

Pernyataan ahli tersebut mengingatkan pelaku pembangunan untuk mengedepankan kemanusiaan dalam memberikan proteksi dan pemberdayaan karena hanya melalui intervensi pembangunan secara bertahap ketiga nilai tersebut dapat tercapai.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan upaya proteksi dan pemberdayaan perempuan Sarmi kini dan kedepan untuk mencapai progres yang menggembirakan.

Menurut Michael P. Todaro (2006:108) mengangkat masalah yang dihadapi perempuan seperti Pendidikan lebih khusus melek huruf. Ditemukan bahwa jumlah perempuan yang melek huruf sama seperti halnya dengan laki-laki angka tersebut dapat lebih besar lagi untuk kelompok usia 15-21 tahun. Jika dikaitkan dengan kenyataan yang dihadapi perempuan Sarmi sebagian besar masih menyandang melek huruf alias buta aksara.

Lebih lanjut dikatakan kesenjangan Gender : antara wanita dan pendidikan bahwa anak-anak perempuan menerima pendidikan yang jauh lebih sedikit dari pada anak-anak laki-laki dihampir setiap negara berkembang. Peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya dilahan pertanian dan di pabrik, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja,

pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.

Faktual tersebut dikaitkan dengan progres pendidikan wanita Sarmi, hasil penelitian Herman Kareth dkk (2011:37) menemukan perempuan Sarmi berjumlah 5.629 orang, terdapat perempuan Sarmi yang buta huruf atau tidak sempat mengenyang pendidikan di 10 distrik berjumlah 1.742 orang (31 %).

Pandangan menarik juga dipaparkan korten dan carner (1993), Sherraden (2006) menyatakan bahwa konsep pembanguna berpusat pada rakyat mengutamakan inisiatif dan kreatif sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama disamping kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

II.METODE PENELITIAN

Melandasi latar belakang pemikiran dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Ulber Silalahi (2006:26) penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2007: 4) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi,

terhadap politik tertentu dan lain-lain, atau lebih singkat dikatakan penelitian yang mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Sedangkan dalam pemetaan dan penjaringan data perempuan di kabupaten Sarmi digunakan tehnik Trainning Of Trainer (TOT) yaitu para tokoh perempuan dilatih dan disebarakan ke distrik dan kampung-kampung sebagai pengumpul data.

III.KAJIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

❖ **Populasi Perempuan Sarmi**

Perempuan Sarmi yang berjumlah 5.629 orang sebagai potensi/aset pembangunan jika di dayagunakan akan menampilkan jati diri dan kreativitas sebagai wujud peran serta dalam proses pembangunan dan proses kualitas hidup keluarga.

- **Populasi dan sebaran Perempuan Sarmi menurut wilayah Administratif Pemerintahan di 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 82 Kampung.**

Data dikumpulkan melalui pemetaan yang dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Kabupaten Sarmi bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan melibatkan 33 perempuan sebagai pengumpul data di 10 Distrik, 2 Kelurahan dan 82 Kampung, selama 6 bulan (1 Juni s.d 31 Desember 2009).

Matrix : 1
Perempuan Sarmi Dalam Angka di 10 Distrik

No.	DISTRIK	KK	JUMLAH PEREMPUAN
1.	Sarmi kota	1.024	2.017
2.	Sarmi Selatan	221	226
3.	Sarmi Timur	208	251
4.	Pantai Timur Barat	416	777
5.	Pantai Timur (betaf)	324	324
6.	Bonggo	562	638
7.	Bonggo Timur	329	382
8.	Pantai Barat (Arbais)	416	422
9.	Tor Atas	349	349
10.	Apawer Hulu	183	243
Jumlah		4.259	5.629

Sumber :Hasilpenelitian 2009

Jumlah perempuan Sarmi pada 10 Distrik 5.629 Jiwa, dengan sebaran terbanyak terdapat di Distrik Sarmi Kota : 2.017 perempuan (36%), Pantai Timur Barat : 777 perempuan (14%) dan Bonggo : 638 perempuan (11%).

Sedangkan jumlah perempuan di 7 Distrik lainnya bervariasi antara 110 – 422 perempuan.

Foto : 4

Pakaian Adat Perempuan Sarmi

- Jumlah dan Sebaran Perempuan Sarmi menurut Socio-Cultural / Kekerabatan di 5 suku besar : Sobey – Armaty – Rumbuay – Manirem – Isirawa (SARMI).

Populasi perempuan Sarmi di 5 suku besar 5.629 orang, dengan jumlah perempuan yang terbanyak berdomisili di wilayah socio-cultural : Sobey 2.268 perempuan, Manirem 1.101 perempuan, Armaty 459 perempuan, Isirawa 648 perempuan dan Rumbuay; 1.020 perempuan.



Pakaian adat menunjukkan jati diri atau identitas perempuan adat Sarmi

Matriks : 2
Jumlah Perempuan Sarmi Menurut 5 Suku Besar di 10 Distrik

NO	5 SUKU BESAR	DISTRIK	JUMLAH PEREMPUAN
1	Sobey	Sarmi	2.017
		Sarmi Timur	251
			2.268
2	Armaty	Tor Atas	349
		Apawer Hulu	243
			592
3	Rumbuay	Bonggo	638
		Bonggo Timur	382
			1.020
4	Manirem	Pantai Timur	324
		Pantai Timur Barat	777
			1.101
5	Isirawa	Sarmi Selatan	226
		Pantai Barat	422
			648
JUMLAH : 5 Suku		10 Distrik	5.629

Sumber :HasilPenelitian 2009

Perempuan Sarmi dari Perspektif Pendidikan

Progres pendidikan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk perempuan yang mendiami wilayah Sarmi. Jika tingkat pendidikannya tinggi, akan nampak peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, namun jika tingkat pendidikan perempuan rendah atau buta huruf, pengaruhnya juga sangat besar, terutama tampilan dan jati diri, harga diri perempuan di mata kaum laki-laki cenderung rendah. Menyadari pentingnya peran perempuan, penulis mengajak para pembaca, penentu kebijakan, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh Gereja dan pemangku kepentingan lainnya, kita simak data riil tentang jenjang pendidikan yang diraih perempuan Sarmi di 10 Distrik, 2

Kelurahan dan 82 Kampung seperti tertera pada matriks 3.

Data pada matriks 2 dibawah tersebut menunjukkan fakta bahwa perempuan Sarmi yang mendiami 10 Distrik lebih banyak lulus pada jenjang pendidikan : Sekolah Dasar : 1.370 (24%), SLTP : 692 (12%), dan SLTA : 489 (9%). Sedangkan jenjang S0, S1 dan S2 lebih sedikit : S0 : 45, S1 : 16 sedangkan S2 : 3 Perempuan.

Selain itu perempuan Sarmi yang putus sekolah rata-rata di 10 distrik yaitu : putus SD : 319, SLTP : 41, SLTA : 22 dan S0 : 1 orang perempuan.

Data lain yang sangat menonjol adalah Tingkat Buta Huruf mencapai 1.742 Perempuan(31%), terdapat kecenderungan angka Buta Huruf tinggi di : Distrik Pantai Barat : 397 perempuan, Distrik Tor Atas : 289 perempuan

Matriks : 3

Pengelompokan Perempuan Sarmi Menurut Jenjang Pendidikan

NO	DISTRIK	TINGKAT DAN JENJANG PENDIDIKAN												BUTA HURUF	
		Jumlah Perempuan Yang Lulus						Jumlah Perempuan Yang Putus Sekolah							
		SD	SLTP	SLTA	S0	S1	S2	SD	SLTP	SLTA	S0	S1	S2		
1	Sarmi Kota	211	151	132	11	12	1	13							152
2	Sarmi Selatan	18	14	32	19	2		46	6	6					124
3	Sarmi Timur	41	26	24		1		56	3	6					117
4	Pantai Timur Barat	502	153	47	1	1		40	5	1	1				59
5	Bonggo Timur	109	54	48				2	1						163
6	Tor Atas	104	74	27	2										289
7	Pantai Barat	107	45	34	4			83							397
8	Apawer Hulu	6	4	1	1										86
9	Pantai Timur	88	95	98	6		2								111
10	Bonggo	184	76	46	1			79	26	9					244
	Jumlah	1.370	692	489	45	16	3	319	41	22	1				
	Totale SD – S2	2.615						Total : SD – S0						383	1.742
Sumber : Pengolahan Hasil Penelitian Tahun 2009															

Distrik Bonggo : 244 perempuan dan Distrik lainnya cenderung antara 59 – 163.

Temuan tim peneliti yang terungkap dan diketengahkan untuk mendapat proteksi dan kebijakan siaga preventif penuntasan yaitu: 1) Jenjang pendidikan SD, SLTP dan SMU cenderung baik artinya sudah dicapai secara kuantitatif, 2) Jenjang pendidikan yang cenderung rendah secara kuantitatif adalah S0 (Diploma), Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2), 3) Angka buta huruf sangat tinggi (1.742) perempuan (31%).

Proteksi dan pemberdayaan pendidikan yang sejalan dengan hak-hak dasar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai tuntutan UUD 1945, pasal 31, ayat (1) “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

dan pengajaran. Khusus untuk penduduk asli Papua (Papua Enginius People) dalam amanat regulasi : UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus melalui 4 bidang prioritas termasuk “sektor pendidikan”. Disisi lain kebijakan pemerintah kabupaten Sarmi tentang pelayanan sektor pendidikan yang memberi peluang bagi putra daerah melalui berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dinilai positif sebagai langkah stimulan awal yang terpuji dan perlu berkesinambungan.

Penanganan pendidikan perlu dicanangkan melalui kebijakan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang melalui program / kegiatan :

- Perluasan akses kelembagaan pendidikan, melalui : program/kegiatan Pendidikan Akademik sekolah formal dari

jenjang SD – Perguruan Tinggi, bagi perempuan usia sekolah

- Pengembangan jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bagi perempuan usia dewasa yang buta huruf dan putus sekolah melalui : Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam Paket-Paket: Paket A setara SD, Paket B : setara SLTP dan Paket C setara SLTA (SMU) serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setara TK/SD.

Pekerjaan

Perspektif pekerjaan menunjukkan bahwa perempuan Sarmi yang bekerja pada kelembagaan pemerintah (SKPD) dinas, badan, kantor, bagian, bidang, distrik, kelurahan, dengan status : PNS 289 perempuan (5%).

Data ini memberi makna bahwa perempuan Sarmi yang bukan PNS dengan status tani dan nelayan, swasta dalam menekuni ekonomi subsisten pola peramu dan peladang berjumlah 5.340 (95%) perempuan dari populasi 5.629 perempuan. Sedangkan Perempuan Sarmi dengan status PNS : 289 orang (5%) dengan pangkat / golongan :

Golongan I	: 3 orang
Golongan II	: 175 orang
Golongan III	: 107 orang
Golongan IV	: 4 orang

Temuan pada aspek pekerjaan, tercatat perempuan Sarmi dari populasi 5.629 orang, sangat sedikit yang terserap sebagai PNS hanya 289 (5%).

Analisis menarik tentang data Perempuan Sarmi yang berstatus

pegawai : 289 orang (5%) dibanding jumlah perempuan 5.629 orang tentunya sangat kontradiktif, karena peluang bagi perempuan relatif kecil dan hak-hak dasar perempuan untuk mendapat pekerjaan serta kesetaraan Gender terabaikan dalam proses pemberdayaan perempuan.

Semua orang yang berpikir rasional dan konstruktif berharap data ini menjadi landasan kebijakan pemberdayaan Perempuan Sarmi ke depan dalam pengembangan jati diri, martabat sebagai perempuan Asli Papua dalam aspek : pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan posisi-posisi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Humanity) perlu di kedepankan.

Data lain yang menarik untuk disajikan pada laporan hasil Pemetaan Perempuan Sarmi yaitu : Perempuan yang sudah/sedang memangku jabatan sebagai; Kepala SKPD, Kepala Bagian, Kepala Bidang, serta posisi penting lainnya.

Matriks : 4
Data Perempuan Sarmi Yang Memangku Jabatan.

No.	Nama	Gol/Pangkat	Jabatan	Lembaga	Tahun	Ket
1.	Selviana Yakwar, SE.	III/d.	Kasubag Mutasi	Kepegawaian	2009	
2.	Katerina A. Aweno, S.Sos.	III/c.	Kepala	Kantor Pemberdayaan Perempuan Kab. Sarmi	2008	
3.	Martha Aweno, S.Sos.	III/d.	Kepala PUSTU (Puskemas Pembantu) Bagaiserwar	SKPD Kesehatan		
4.	Yohana Sewar, S.Pd.	III/d.	Kepala Sekolah	Kepala Sekolah SMPN 1 Maranena		

Sumber: Penelitian 2009

❖ **Perempuan Sarmi dari Perspektif Kegiatan Ekonomi Produktif Mandiri.**

Sebagian besar : 5.340 perempuan (95%) melakukan pekerjaan pola peramu, peladang sebagai tani berkebun dan nelayan tradisional dengan mata pencaharian utama : nelayan tradisional, menokok sagu dan berkebun.

Tambak ikan mas dan nila yang dilakukan secara mandiri dalam bentuk Kolam Pemancingan model percontohan dengan ransangan dari Pemerintah Daerah yang dilakukan ibu Susana Ramandey.

Foto : 5

Kegiatan Produktif Mandiri



Nampak foto diatas ibu Ramandey sedang memberi makan ikan. Usaha ini dilakukan dengan mendapat dana ransangan dari pemerintah

kabupaten sarmi melalui dinas perikanan Rp.150.000.000 yang diberikan dalam 3 tahap. Usaha tersebut dilakukan melalui pola pemancingan yang dibuka pada setiap hari sabtu dan minggu dengan harga 1 kilo ikan nila Rp. 50.000, ikan mas 1 kilo Rp. 65.000. Jika dianalisis pendapatan perminggu bisa mencapai Rp. 1.500.000.

Kegiatan produktif mandiri yang juga dilakukan perempuan Sarmi adalah menokok sagu dan menangkap ikan dengan peralatan tradisional

Foto : 6



Analisis kritis tentang makanan pokok; sagu, umbi-umbian yang sedang dilakukan penduduk asli 5 suku besar di wilayah Sarmi di prediksi ke depan akan beralih dari fungsi peramu dan peladang dengan makanan pokok sagu, umbi-umbian ke nasi.

Paparan faktual tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan asli Papua berbasis gender termasuk perempuan Sarmi tertera pada matriks sebagai berikut :

Matriks : 5

Pembagian Kerja Berbasis Gender

No.	JenisPekerjaan	Laki-laki (♂)	Perempuan (♀)	Keterangan
1.	Berburu - Olah/masak hasil buruan	V -	- V	
2.	Menangkap Ikan -Mengolah hasil (masak) -Menjual ke Pasar	V - -	- V V	
3.	Membukalahanbaru - Menebang-bakar - MembuatPagar - Menanam - Memelihara - PanenHasildanjual	V V V V V	- - V V V	
4.	MenokokSagu : - Menebang - Memotong /membelah - Tokok - Ramas - Membawahasilkerumah - Olahuntuk di makan	V V V - - - -	- - - V V V	
5.	Memasak di rumah	-	V	
6.	MengurusAnak - Memandikan -Antar ke sekolah bagi yang sekolah - Member Makanan	- V V -	V V V V	
7.	MencuciPakaian	-	V	
8.	MencariKayuBakar - Menebang - Membelah/memotong - Membawa/pikulkerumah	V V V -	- - - V	
9.	DLL	-	-	

Tentang pembagian kerja atau kesetaraan Gender, seperti tertera pada matriks, kalau ternyata ada pekerjaan yang dilakukan perempuan sendiri alias memberi beban kerja bagi perempuan, itu adalah penyimpangan yang dilakukan seorang laki-laki. Tidak ada folosofi atau pandangan suatu suku / adat di Papua yang memberi beban kerja lebih besar kepada perempuan, karena alasan perempuan di bayar mahal (Harta Kawin).

IV.Kesimpulan

1. Pemetaan perempuan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang jumlah perempuan, identitas

dan proses gender menurut Distrik, Kelurahan dan Kampung, baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Sarmi.

- Melalui data yang akurat tentang perempuan, dapat diketahui permasalahan kompleks yang dihadapi perempuan, seperti : beban kerja, tindak kekerasan, pelecehan seksual, angka buta huruf yang tinggi, angka kematian bayi/anak dan ibu, dan aspek lainnya.
- Perempuan yang berdomisili di distrik, kampung – kampung yang terisolir belum di data secara lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri-Pemda Provinsi Papua, UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jakarta, 2001.
- Eduard Fonataba-Bupati Sarmi, Gerbang Sarmi, Pemda Sarmi, Sarmi, 2009.
- Fredy Numbery, Sagu Dalam Prospek Ketahanan Pangan dan Energi Nasional (Potensi yang Terabaikan), Jakarta, 2009.
- Gubernur Provinsi Papua, Kesepakatan Bersama Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Pemda, Jayapura, 2007.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta, 2007.
- Koentjaraningrat, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- Koentjaraningrat, Orang BGU (Bonggo), Universitas Cenderawasih, Jakarta, 1964
- Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Tiga Tata Nilai Inti Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2002.
- M.L. Jhingan, Pembentukan Modal Manusia -5 Cara Pengembangan Dan Perencanaan, Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Pemda-SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Sarmi, Visi dan Misi, KPP. Sarmi, serta Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Sarmi 2008.
- Pemda Provinsi Papua (Dinas Pariwisata-Uncen), Identifikasi Dan Pemetaan Potensi Obyek Wisata Di Danau Rumbawai dan Gunung Foja Kabupaten Mamberamo Raya, Uncen, Jayapura, 2009.
- Pemda Kabupaten Sarmi, Visi dan Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RSPM), Pemda Sarmi, 2005.
- Uncen – Pemda Provinsi Papua, Laporan Penelitian 6 Tahun Evaluasi Otsus Papua, Pemda-Uncen, Jayapura, 2007.
- UU No.23 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Jakarta, 2010.
-, Perempuan, Persamaan Gender dan Perceraian,.....